

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 06 Desember 2017, presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mendeklarasikan bahwa pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pernyataan Donald Trump tersebut disampaikan di Gedung Putih Washington DC, pada Rabu 06 Desember 2017, saat itu di dampingi Wakil Presiden AS Mike Pence. Berikut kutipan terjemahan pidato Donald Trump, “Oleh karena itu, saya telah menentukan bahwa ini saatnya untuk mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel” (Novi, 2017). Kabar tersebut membuat dunia internasional kaget dan banyak mengecamnya, walaupun ada sebagian negara juga mendukung kebijakan luar negeri Amerika Serikat tersebut. Secara konteks legal-formal pernyataan tersebut sama sekali tidak memiliki dampak positif bagi Amerika Serikat, akan tetapi pernyataan ini tentu mengandung makna politik yang sangat kuat dan mendalam.

Kebijakan yang diambil Donald Trump tersebut tentunya memperkeruh suasana, yang kemudian mengundang gelombang protes dari negara-negara lain, terutama negara-negara Arab dan termasuk Indonesia. Negara sekutu Amerika Serikat pun mengecam keras keputusan Donald Trump tersebut, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Irlandia bahkan Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Alasannya, langkah Trump tersebut dinilai banyak kalangan akan membakar amarah warga di Timur Tengah, dan Amerika Serikat telah meninggalkan peran utamanya sebagai mediator ulung perdamaian antara Israel-Palestina (www.pikiran-rakyat.com, 2017).

Pernyataan kontroversial Donald Trump itu sebenarnya tidak lepas dari janjinya selama masa-masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2015-2016. Seperti presiden-presiden Amerika Serikat sebelumnya, isu tentang status Yerusalem dan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem selalu menjadi janji politik saat kampanye calon presiden Amerika Serikat. Beberapa presiden AS yang pernah mengatakan hal senada seperti Bill Clinton, George W. Bush bahkan Barack Obama, akan tetapi ketika mereka menjadi presiden, dihadapkan pada realitas, ternyata tidak ada satu pun presiden yang menepati janji politiknya tersebut.

Alasan konkret dari tidak beraninya setiap presiden Amerika Serikat dalam menepati janjinya ialah karena mereka tertahan dengan beberapa Undang-undang atau komitmen yang diinisiasi oleh Amerika Serikat sendiri. Yakni seperti Perjanjian Perdamaian Camp David I (1978), Perjanjian Oslo I (1993), Perjanjian Oslo II (1995), Perjanjian Hebron (1997), Perjanjian Wye River I (1997), Perjanjian Wye River II (2000), Perjanjian Camp David II (2000), dan Perjanjian Annapolis (2007), yang semuanya bertujuan untuk perdamaian Israel dengan Palestina atau *Two State Solution* (Solusi Dua Negara) secara khusus.

Alasan hukum lainnya, ketika kapasitas Amerika Serikat sebagai negara Super Power juga tertahan oleh komitmen Dewan Resolusi Keamanan PBB No.478, yang disahkan pada tahun 1980. Isi Resolusi tersebut jelas-jelas menolak pernyataan Israel bahwa Yerusalem adalah “Ibu Kota Israel seluruhnya”. Karena Yerusalem Timur adalah wilayah yang direbut Israel dalam Perang Enam Hari tahun 1967, sebuah perang yang dimulai Israel. Resolusi 478 tersebut memberi tekanan langsung kepada Israel untuk menyerahkan wilayah yang diduduki dan menegosiasikan perdamaian. Amerika Serikat sendiri mendukung tujuan tersebut sejak tahun 1967 melalui resolusi PBB yang bulat

sebanyak 242 suara, menyerukan penarikan angkatan bersenjata Israel dari wilayah-wilayah yang direbut Israel pada tahun 1967, (Seraamedia, 2017). Sebelum itu, pada tanggal 29 November 1947 Majelis Umum PBB juga menerbitkan Resolusi Nomor 181/1947. Resolusi ini membagi Palestina menjadi dua negara: Yahudi (56 %) dan Palestina (43 %) dengan menjadikan Yerusalem dan Bethlehem sebagai *Corpus separatum* (bagian tersendiri), zona internasional, (Kuncahyono, Kredensial, 2018).

Untuk setiap usaha penundaan realisasi kebijakan pemindahan Kedubes Amerika Serikat dan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel sendiri, elit pemerintahan Amerika Serikat mengadakan agenda rutin evaluasi enam bulan sekali. Salah satu *output*-nya yaitu menandatangani pengabaian oleh presiden Amerika Serikat yang ingin menunda janji-janji kampanye dan implementasi pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Presiden-presiden AS memang selalu mengabaikan tuntutan Kongres atas alasan keamanan, apalagi hal itu terbentur Perjanjian Perdamaian Camp David I (1978), Perjanjian Oslo I (1993), Perjanjian Oslo II (1995), Perjanjian Hebron (1997), Perjanjian Wye River I (1997), Perjanjian Wye River II (2000), Perjanjian Camp David II (2000), Perjanjian Annapolis (2007), dan atau Resolusi 181 PBB tahun 1947. Apalagi Amerika Serikat memang tiang penyangga perundingan damai Israel-Palestina, Amerika Serikat selama ini memang merupakan salah satu sponsor terpenting dalam negosiasi damai Israel-Palestina (Burdah, 2017).

Isu tentang Israel-Palestina atau Yerusalem itu sendiri, dimaknai sebagai isu sensitif yang tidak sembarangan kebijakan dikeluarkan. Setiap presiden-presiden Amerika Serikat sebelum Trump atau Amerika Serikat sendiri memang hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tentang Israel-Palestina. Presiden-presiden sebelum Trump memikirkan *Long*

Time Consiquence, *Global Stability*, dan *Standing* Amerika sendiri di dunia internasional. Maka berangkat dari itu, kemudian realitas tersebut diputarbalikkan di masa kepemimpinan Donald Trump. Trump sangat berani mewujudkan kampanye politiknya tentang status Yerusalem yang seolah-olah mengacu pada Undang-undang *Jerusalem Embassy Act of 1995*, sebagai pembenaran. *Jerusalem Embassy Act of 1995* adalah undang-undang yang pernah disahkan Kongres tanggal 23 Oktober tahun 1995, Undang-undang tersebut sebagai badan hukum atas proses awal pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel, dan pewujudannya paling lambat tanggal 31 Mei 1999, (Breger, 1995).

Maka setelah kebijakan pemindahan Kedubes Amerika Serikat dan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel itu dilakukan, tentu *standing* Amerika semakin terancam di dunia internasional karena banyak negara-negara mengancam kebijakan tersebut. Label sebagai juru damai dan pengamanan Israel-Pelstina bahkan dunia akan terkikis, ketika Amerika sendiri seolah menjadi *security treade* bagi negara-negara lainnya.

B. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan data di atas diumumkankannya Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, Maka hal ini kemudian bisa diambil rumusan masalah oleh penulis adalah: ***Mengapa Donald Trump Tetap Mengambil Kebijakan untuk Memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem dan Mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel?***

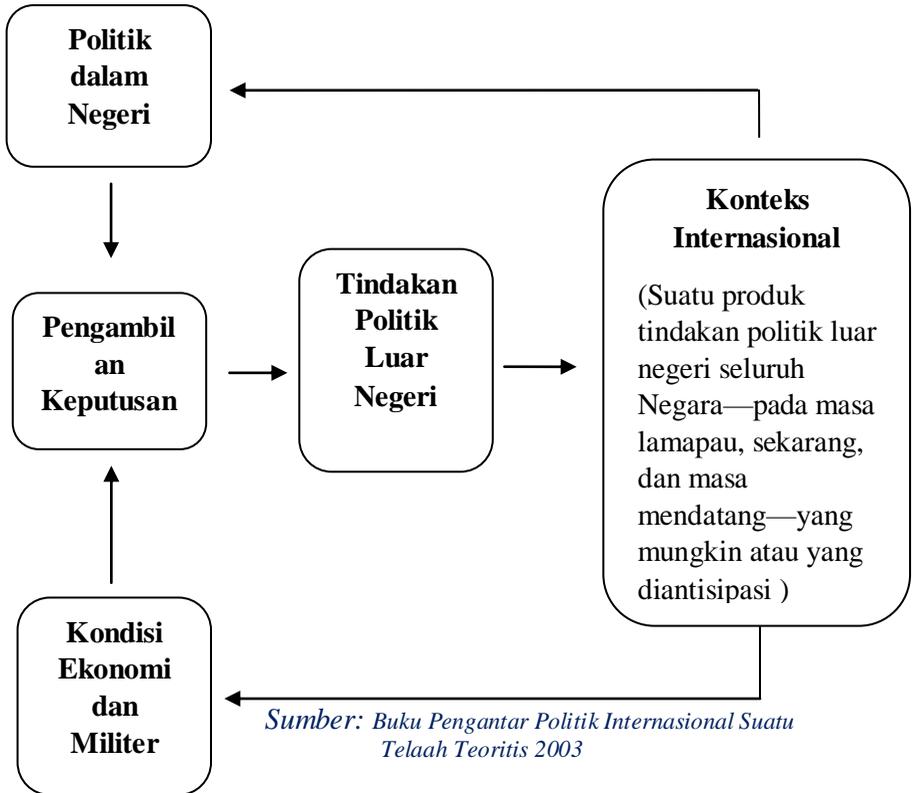
C. Kerangka Pemikiran

Menjawab rumusan masalah tersebut di atas peneliti mencoba menggunakan teori Proses Pengambilan Keputusan dari William D. Coplin, dalam bukunya yang berjudul

“*Introduction of International Public. Prentice,1980*” versi terjemahan “*Pengantar Politik Internasional, Suatu Telaah Teoretis: Sinar Baru Algensindo edisi ke-2 2003*”. Teori ini akan menjelaskan bagaimana serangkain proses pengambilan keputusan luar negeri dirumuskan beserta hal-hal yang memengaruhinya. Kebijakan luar negeri suatu negara secara general adalah serangkain keputusan berkaitan dengan fenomena antarbangsa dan negara. William D Coplin menggambarkan teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri dalam sebuah model. Pembuatan Keputusan Luar Negeri dibuat atas pengaruh dari pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Coplin Kebijakan Luar Negeri suatu negara adalah merupakan hasil dari tiga determinan atau konsiderasi yang mampu memengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri. Ketiga determinan tersebut adalah; *pertama*, kondisi politik dalam negeri, *kedua* faktor ekonomi dan militer, dan *ketiga* adalah konteks internasional (Coplin & Marbun, 2003).

Menurut William D. Coplin dalam bukunya Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoretis, dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, *policy maker* akan sangat bergantung juga pada *policy influencers*. Bagi pembuat kebijakan, *policy influencers* merupakan pendukung jalannya roda pemerintahan. Dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan luar negeri suatu negara, politik domestik memiliki peran penting tersendiri.

Bagan 1.1 Ilustrasi Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin



1. Kondisi Politik dalam Negeri

Kebijakan luar negeri dihasilkan dari para pengambil kebijakan dan proses pengambil kebijakan yang melibatkan berbagai aktor dalam kondisi-kondisi tertentu. Kebijakan luar negeri dihasilkan oleh unsur-unsur domestik seperti eksekutif, legislatif, badan-badan eksekutif dan pengaruh dari kelompok kepentingan atau pelobi, (Duncan, 2003). Coplin merumuskan bahwa ada empat konsiderasi yang berperan dalam politik dalam negeri atau *Domestic Politics* dalam penyusunan

kebijakan luar negeri, Yakni; 1) *Bureaucratic Influencers* (Birokrat yang Memengaruhi), 2) *Partisan Influencers* (Partai yang Memengaruhi), 3) *Interest Influencers* (Kelompok Kepentingan yang Memengaruhi), dan 4) *Mass Influencers* (Massa yang Memengaruhi), (Coplin & Marbun, 2003). Maka dari keempat konsiderasi tersebut menjadi sumber dukungan bagi penguatan rezim tertentu dalam suatu negara yang disebut *Policy Influencers*. Lebih jauh Coplin mengatakan, dalam sistem pengaruh kebijakan terjadi hubungan timbal balik antara pengambil keputusan dengan *Policy Influencers*.

Dalam penelitian ini, kelompok dan individu yang pro-Israel di Amerika Serikat menjadi bagian dari *Interest Influencer* (kelompok kepentingan yang memengaruhi pengambil kebijakan). Mereka bergabung bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama, yang cukup luas cakupannya. Kelompok Lobi Yahudi (*Jewish Lobby*) dan kelompok-kelompok non pemerintah lainnya sangat dibutuhkan untuk para *Policy Influencer* atau pengambil keputusan terutama di negara yang menganut sistem terbuka (demokrasi) seperti Amerika Serikat. Kelompok-kelompok dan individu yang pro-Israel di Amerika Serikat dari dulu mempunyai finansial yang sangat besar, mereka pun rela memberikan dana besar untuk kepentingan Israel. Melalui pemberian dana besar yang diarahkan kepada beberapa pemimpin partai, baik dari partai Republik atau Partai Demokrat dan atau orang-orang yang memiliki kekuasaan yang bisa menentukan dalam pemberian suara dan dukungan menyangkut Israel.

Seperti artikel yang ditulis Heather Timmons 2017 menjabarkan bahwa, pelobi pro-Israel yang berkuasa telah menghabiskan puluhan juta dolar di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir, dengan harapan dapat memengaruhi Kongres dan cabang-cabang eksekutifnya. Karena dihantui kekhawatiran bahwa presiden Barack Obama (saat Obama berkuasa) akan kurang mendukung Israel, sumbangan oleh

individu dan komite aksi politik melonjak di tahun 2008, tahun pertamanya Obama menjabat. Sumbangan mereka mencapai rekor hampir \$20 miliar pada tahun 2016, dan pada tahun 2017-2018 jumlah bantuan semakin naik pesat.

Tabel 1.1 Bantuan Finansial Kelompok Pro Israel Terhadap Elit Pemerintahan AS dari Tahun 1990-2018

Pro-Israel: Long-Term Contribution Trends



Sumber : www.opensecrets.org

Grafik dan angka-angka pada halaman di atas didasarkan pada kontribusi dari donor (individu maupun perusahaan dan serikat pekerja yang memberikan langsung dari kas mereka) kepada kelompok luar dan dari PAC (termasuk PAC super) dan individu yang memberikan lebih \$ 200 kepada kandidat dan komite partai (www.opensecrets.org, 2018).

Diketahui, donor terbesar individu pro-Israel datang dari pebisnis Kasino, Sheldon Adelson dan istrinya Miriam Ochsorn. Mereka mendonorkan finansial untuk Partai Republik terbesar di tahun 2016 yang sumbangannya mencapai \$83 juta. Bahkan kata Michael Green, seorang profesor sejarah di Universitas Nevada, Sheldon dan Ochsorn adalah orang yang benar-benar memiliki komitmen ideologis lebih besar atas pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem dan

mengakuinya sebagai Ibu Kota Israel (www.matamatapolitik.com, 2017).

Tabel 1.2 Bantuan Finansial Kelompok Lobi Yahudi Terhadap Elit Pemerintahan AS di Tahun 2018

Top Lobbying Clients, 2018

Client/Parent	Total
American Israel Public Affairs Cmte	\$2,634,865
Israeli-American Coalition for Action	\$510,000
J Street	\$300,000
Zionist Organization of America	\$150,000
Christians United for Israel Action Fund	\$90,000

Sumber : www.opensecrets.org

Grafik dan angka-angka di atas menunjukkan sumbangan besar finansial kelompok Lobi Yahudi kepada pemerintah, termasuk kepada eksekutif Amerika Serikat yang jumlahnya sangat signifikan pada tahun 2017-2018. Kegiatan lobi yang telah bertahun-tahun dilakukan kelompok lobi Yahudi tersebut menjadi peluang emas untuk kandidat-kandidat presiden Amerika Serikat yang ingin maju di Pilpres. Dalam beberapa tahun terakhir, memang kandidat politik AS telah mencoba untuk mengalahkan pesaing mereka dengan melihat siapa yang lebih pro-Israel dalam kelompok lobi ini, dengan harapan akan memberi mereka lebih banyak dukungan secara finansial dan sebaliknya. Dan salah satu kelompok Lobi yang jor-joran menggelontorkan dana adalah AIPAC yang sampai menghabiskan jutaan setiap tahunnya untuk melobi pengambil kebijakan (*Policy Influencer*) Amerika Serikat. Tekanan kelompok lobi pro-Israel di Amerika Serikat memang sangat luar biasa. Perlu dijabarkan bahwa kelompok lobi ini

adalah terdiri dari warga Amerika Serikat baik keturunan Yahudi atau dari non Yahudi, mereka juga dating dari individu-individu lainnya yang memang memiliki komitmen mendalam untuk memastikan agar kebijakan luar negeri AS selalu mengutamakan/mendahulukan kepentingan-kepentingan Negara Israel.

Menurut sejarawan Melvin I. Urofsky, “Tidak ada kelompok etnik lain dalam sejarah AS memiliki keterlibatan begitu ekstensif dengan sebuah negara lain.” Dan Steven T. Rosenthal sependapat dengan hal itu, ia menulis bahwa “sejak tahun 1967-sekarang tidak ada negara lain dengan warga negara yang memiliki komitmen begitu besar terhadap keberhasilan sebuah negara lain selain orang Yahudi Amerika terhadap Israel.” Bahkan di tahun 1981, pakar ilmu politik Robert H. Trice menggambarkan lobi pro-Israel sendiri; “terdiri atas setidaknya 75 organisasi berbeda—sebagian besar Yahudi—yang secara aktif mendukung sebagian besar aksi dan posisi kebijakan pemerintah Israel” (Mearsheimer, Jhon J. & Walt, Stephen M., 2010).

Dalam sistem terbuka seperti Amerika Serikat, ada kecenderungan bagi organisasi-organisasi non pemerintah untuk berkembang lebih cepat berdasarkan isu politik tertentu. Karena hak untuk protes biasanya diakui sebagai bagian dari peraturan dalam sistem politik yang demokratis, Orang-orang yang menolak kebijakan tertentu dengan mudah akan menemukan orang-orang yang sepatutnya dengan mereka sehingga mereka bisa mengorganisasi tekanan terhadap *interest influencers* dan pengambil kebijakan *Policy Influencer* yang lain.

Selain karena kuatnya pengaruh kelompok kepentingan atau kelompok dan individu pro-Israel, dalam politik dalam negeri Amerika Serikat ada satu RUU yang mewajibkan kepala negaranya untuk memindahkan Kedubes Amerika Serikat di Israel pada tahun 1995, RUU tersebut

adalah *Jerusalem Embassy Act of 1995*. *Jerusalem Embassy Act of 1995* adalah undang-undang yang pernah disahkan Kongres tanggal 23 Oktober tahun 1995. Undang-undang tersebut sebagai badan hukum atas proses awal pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel, dan pewujudannya paling lambat tanggal 31 Mei 1999, (Breger, 1995).

Undang-undang yang disahkan Kongres tersebut akhirnya dapat direalisasikan oleh Donald Trump. Ia secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan Departemen Luar Negeri untuk memulai persiapan pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, bahkan sekarang telah dilakukan pembangunan gedung Kedubes baru di Yerusalem. Dan setelah pengumuman kebijakan baru itu, Donald Trump telah menandatangani MOU presiden diperuntukkan Menteri Luar Negeri AS yakni ketetapan Presiden No. 2018-02 isinya adalah pemotongan 50% *budget* yang biasanya direalisasikan jikalau membuka kedutaan besar baru. Maka dengan Kongres bisa meloloskan Undang-undang yang mengharuskan AS segera memindahkan Kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem menjadi salah satu alasan keputusan Donald Trump. Trump tidak ujuk-ujuk merealisasikan RUU tersebut, ia juga pernah sekali menandatangani surat penangguhan realisasi RUU tersebut pada 01 Juni 2017 karena di bulan itu sudah jatuh tempo. Akan tetapi Donald Trump tidak punya alasan lagi untuk menunda-nunda RUU untuk direalisasikan di enam bulan berikutnya. Karena pada enam bulan berikutnya reputasi Donald Trump dipertaruhkan di hadapan donor-donornya, apalagi tekanan-tekanan kuat dari kelompok lobi pro-Israel yang selalu menghantui Donald Trump.

Selain kedua faktor tersebut di atas, kebijakan Donald Trump tersebut juga cenderung berusaha menyenangkan basis massa pendukungnya dan memenuhi janji kampanyenya. Orang-orang Kristen Evangelis, adalah salah satu kelompok pro-Trump yang paling setia dari pemilih Amerika, sekitar 53

persen mendukung perpindahan kedutaan ke Yerusalem, sementara 40 persen menentang relokasi tersebut, (Telhami , 2017). Dan motivasi utama Trump membuat pernyataan tersebut termasuk usaha memenuhi janji kampanyenya untuk membuat kebijakan yang mengedepankan kepentingan warga AS di atas segalanya yang dikenal dengan kebijakan “*America First*”.

2. **Kondisi Ekonomi dan Militer**

Situasi Ekonomi dan Militer negara merupakan faktor penting bagi pertumbuhan/kemajuan suatu negara, dan setiap negara tentu memiliki tujuan nasional di bidang ekonomi maupun militer. Maksudnya adalah bahwa negara tersebut harus mampu atau memiliki kesediaan untuk menciptakan kondisi yang diperlukan atau kondusifitas sebagai penopang politik luar negerinya baik dari persepektif ekonomi maupun keamanan atau militernya (Coplin & Marbun, 2003). Secara realistis-historis, Ekonomi dan Militer Amerika Serikat memang paling mapan dan paling kuat di dunia hingga saat ini. Sebagai penyandang predikat negara *Super Power* atau negara adidaya, Amerika Serikat lebih unggul daripada negara-negara lain apalagi negara terbelakang. Dalam kemampuan ekonomi dan dalam hal senjata nuklir dengan sistem peluncurannya yang maju, membuat negara-negara berkembang bahkan maju sekalipun mendekati Amerika Serikat untuk melakukan kerjasama bilateral. Sedangkan untuk pihak Amerika Serikat sendiri ketika ada satu-dua negara melakukan kerjasama menganggapnya sebagai sekutu yang potensial dan proporsional.

Kalau melihat kerjasama ekonomi dan militer antara Amerika Serikat dengan Israel adalah satu hubungan bilateral antara negara adidaya dengan negara maju. Menurut Coplin, hubungan antara dua negara dalam sektor Ekonomi dan Militer terjadi karena faktor simbiosis-mutualisme atau

hubungan yang saling menguntungkan. Kalau dikontekskan dengan teori Coplin, hubungan Amerika Serikat dengan Israel adalah representasi dari negara adidaya dengan negara maju.

Namun yang harus diperhatikan menurut Coplin ternyata ada fenomena lagi yang kadang luput dari pantauan kita. Meski negara adidaya cukup gampang untuk menyeterir dan menekan negara-negara maju, namun mereka telah mendekati negara adidaya dengan cara defensif dan represif, baik dengan mengklaim netralitas ataupun dengan memaksakan suatu aliansi dengan salah satu pihak negara adidaya (Coplin & Marbun, 2003, hal. 143). Hal ini yang terjadi dalam hubungan Ekonomi dan Militer Amerika Serikat dengan Israel. Pendekatan defensif dan represif Israel dari puluhan tahun lalu hingga saat ini membuat Amerika Serikat tanpa pamrih memberikan bonus-bonus bantuan yang luar biasa besarnya terhadap Israel.

Dalam konteks militer, Amerika Serikat memberi bantuan militer terbesar terhadap Israel yang disahkan pada Rabu (14/09/2016). Waktu itu Amerika Serikat dan Israel menandatangani nota kesepahaman paket bantuan militer terbesar dalam sejarah hubungan bilateral kedua negara. Paket bantuan tersebut senilai 38 miliar dolar AS atau sekitar Rp 500 triliun untuk jangka waktu 10 tahun. Dari paket bantuan itu, Israel akan menerima 3,8 dollar AS (50,029 triliun) setiap tahun. Dan paket bantuan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan bantuan yang diterima Israel selama ini sejak tercapainya kesepakatan damai Israel-Mesir di Camp David tahun 1979, yakni sekitar 3,1 miliar dollar AS pertahun (Rahman, 2016).

Menurut data *Congressional Research Service*, jumlah bantuan Amerika Serikat sejak 1949 hingga 2017 telah mencapai sekitar 127,5 miliar dollar AS. Jumlah tersebut mencakup bantuan berbagai bidang, di antaranya bantuan ekonomi senilai 30,8 miliar dolar AS dan 79,8 dolar AS untuk

bantuan militer (www.kumparan.com, 2017). Berbagai kerjasama ekonomi-militer telah lahir dari hubungan bilateral Amerika Serikat dan Israel diantaranya adalah *United State Israel Enhance Security Cooperation Act of 2012*, *United State-Israel Missile Defense Cooperation Act of 2013*, *United State-Israel Energy Cooperation Act*, *United States Israel Strategic Partnership Act of 2013*, *Iron Dome Support Act*, *Memorandum of Understanding* (Priyatna, 2014).

Israel tidak bisa dimungkiri merupakan prioritas utama penerima bantuan luar negeri Amerika Serikat, dan pembeli utama sistem persenjataan Amerika Serikat, kedekatan hubungan kedua negara sudah dibangun sejak Israel didirikan pada Mei 1948. Bahkan ada anekdot: *senjata tercanggih yang dibuat AS hari ini, keesokan hari sudah ada di Israel*. Paket bantuan militer jumlah besar yang diberikan Amerika Serikat untuk Israel tujuannya untuk menjamin keamanan Israel di tengah ancaman negara-negara tetangganya (negara-negara Arab, terutama Iran) yang tengah bergejolak dengan perang.

Secara kasat mata kebijakan luar Amerika Serikat atas pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem dan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel berdampak buruk dan Amerika Serikat seolah-olah tidak mendapatkan insentif apa-apa. Akan tetapi dibalik itu semua juga berdampak baik berkat kemitraan dengan Israel sebagai kaki tangannya di Timur Tengah, terutama pengaruh dalam ekspansi ekonomi terhadap negara-negara Arab mengingat sudah terkikisnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan minyak tersebut. Dan kepentingan utama Amerika Serikat atas kedekatannya dengan Israel bukan karena simpati kepada orang-orang Yahudi sebagai korban Perang Dunia II atau alasan dangkal lainnya, melainkan karena alasan praktis untuk mengamankan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur-Tengah yang sebelum era kepemimpinan Trump kurang diperhitungkan lagi.

Dalam konteks ekonomi, kebijakan Amerika Serikat memindahkan Kedubes dan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel adalah bagian dari paket kebijakan-kebijakan untuk merebut pengaruh dan dominasi ekonomi kembali di Timur Tengah. Karena selain Rusia yang sangat berambisi memainkan tangan-tangannya, ada Tiongkok yang juga mulai menunjukkan taringnya di kawasan tersebut. Karena pada sudut pandang lain, kebijakan Trump tersebut sebenarnya tidak lahir di siang bolong. Meski ada gelombang protes di Timur Tengah yang notabene lahir negara-negara Arab, tapi Amerika Serikat tidak takut lagi kalau sampai negara tersebut memutus atau kemudian mengembargo pasokan minyak ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat.

Buktinya, di tahun 2018 Amerika Serikat telah berhasil menjadi negara pertama sebagai produsen minyak, dan telah menyingkirkan Rusia dan Arab Saudi yang sebelumnya duduk di rangking teratas. Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak tahun 1973 menjadi produsen minyak mentah terbesar di dunia. Bahkan di Bulan Juni-Agustus 2018, *output* AS mencapai 11 juta barel perhari. Dan perkiraan Administrasi Informasi Energi AS (EIA), Amerika Serikat akan tetap di depan Rusia dan Arab Saudi hingga tahun 2019 (www.wartaekonomi.co.id, 2018). Bahkan sebuah studi yang dilakukan oleh Rystad Energy 2015-2016, mengestimasi kalau cadangan minyak di Amerika Serikat lebih melimpah dari Rusia dan Arab Saudi. Menurut Laporan Rystad Energy, sudah ditemukan sumber minyak mencapai kisaran 264 miliar barel. Sementara itu cadangan minyak di Arab Saudi mencapai 212 miliar barel dan Rusia mencapai 256 miliar barel. Analisis tersebut berdasarkan pada 60.000 ladang minyak di seluruh dunia dan dilakukan selama 3 tahun oleh Rystad Energy yang berkantor di Oslo Norwegia (www.kompas.com, 2016).

Jadi Amerika Serikat telah menerapkan *Independent Oil* dimulai dari masa kepemimpinan Barack Obama di tahun 2010-an, dan di masa Donald Trump dominasi produsen

minyak dunia telah berhasil diraih. Amerika Serikat sedikit demi sedikit mengurangi volume impor minyak dari Timur Tengah. Pada awal tahun 2018, impor minyak mentah bersih AS turun sebesar 1,6 juta bph menjadi 4,98 juta barel perhari, tingkat terendah sejak EIA mulai mencatat data pada 2001. Dan yang paling penting, *Independent Oil* Amerika Serikat tersebut membuat cerita baru bahwa kebijakan-kebijakan kontroversial sekalipun tidak membuat AS gentar, karena AS dibawah nakhoda Donald Trump lebih progresif dan *Outward Looking Policy*, selalu mengusahakan produksi dalam negeri agar dapat diekspor dan dapat menjadi komoditi nomor wahid di pasar internasional.

3. Konteks Internasional

Konteks internasional menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Konteks internasional ini berkaitan dengan geopolitik suatu negara dan ilmuan realis telah memberikan penjelasannya (Coplin & Marbun, 2003). Konteks internasional juga memengaruhi dan menentukan proses pengambil kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut Coplin ada 3 elemen dasar dalam menjelaskan dampak konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis. Dari ketiganya, geografi memainkan peranan yang penting walaupun tidak yang paling penting. Faktor geografi merupakan yang hal utama dalam terciptanya organisasi lintas negara seperti Uni Eropa, NATO, ASEAN dan sebagainya. Sehingga tercipta hubungan-hubungan politik dan ekonomi antarnegara anggotanya. Dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri harus melihat faktor itu dalam membuat kebijakan. Secara geografis, Amerika Serikat merupakan negara di Amerika Utara yang membentang dari Laut Atlantik di timur hingga Laut Pasifik di barat, Amerika Serikat adalah negara paling penting di benua ini. Sesuai dengan arti “Serikat” yaitu perkumpulan atau himpunan, gabungan atau persekutuan. Akan tetapi yang musti diperhatikan, Amerika Serikat sebagai

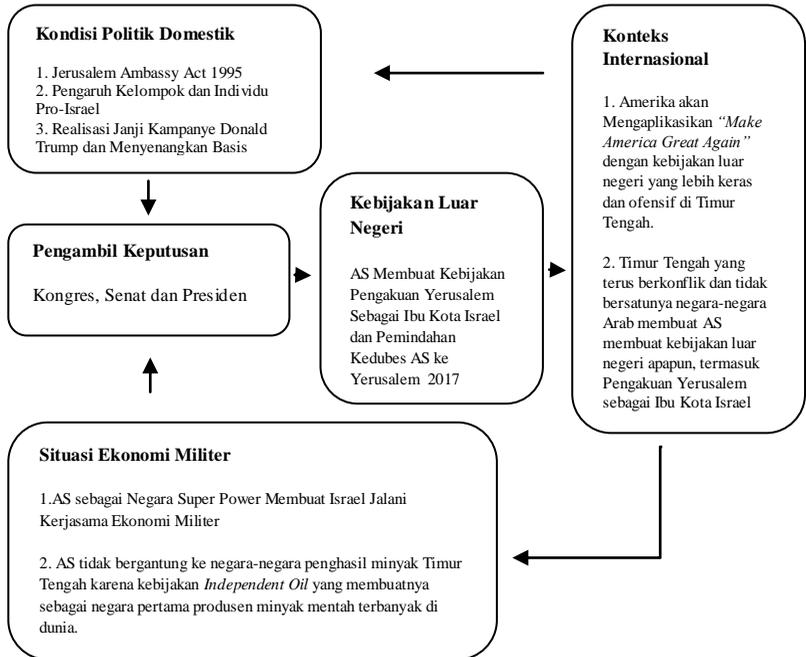
negara *Super Power* memiliki pengaruh besar di dalam kawasan, lintas kawasan bahkan di dunia internasional seutuhnya. Kebijakan pemindahan Kedubes AS dari Tel-Aviv ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel tentu juga mempertimbangkan faktor internasional. Kebijakan Donald Trump ini adalah paket kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang ingin menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih tegas atas isu Israel-Palestina. Tujuan Trump adalah untuk perdamaian kedua negara di tanah gurun pasir tersebut. Karena opsi kebijakan-kebijakan sebelumnya hanya sebatas perundingan-perundingan dan *output*-nya tidak kelihatan. Maka, meski cenderung berpihak kepada Israel, Donald Trump mencoba formula baru untuk perdamaian Israel-Palestina. *“Setelah lebih dari dua dekade keringanan, kita tidak mendekati kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Akan menjadi kebodohan jika mengasumsikan bahwa mengulang formula yang sama persis sekarang akan menghasilkan hasil yang berbeda atau lebih baik. Jika Perdamaian di Timur-Tengah seperti serpihan salju yang parah, maka lokasi Kedubes AS di Israel bisa mencairkannya,”* kata Trump pada tahun 2016.

Dengan semboyan *“Make America Great Again”* merupakan suatu usaha sistematis di dalam negeri dan restorasi kekuatan hegemoni Amerika Serikat di level internasional. Kemudian Trump ingin memprioritaskan warga Amerika Serikat dan keamanannya terkait kebijakan luar negeri. Donald Trump dalam menghadapi persoalan politik luar negeri juga akan membangun kembali kekuatan militer dan mengembalikan kebebasan sistem finansial negara. Kebijakan Amerika Serikat atas pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem ternyata juga dilandasi dari sosio-politik di Timur Tengah. Timur Tengah masih menjadi tempat strategis untuk menjalankan/menyelurkan kepentingan-kepentingan domestik Amerika Serikat, termasuk dalam pemerintahan Donald Trump. Meskipun dalam kampanyenya Trump akan melakukan

politik isolasionis dalam politik luar negeri, tetapi ketika menjabat jadi presiden justru Amerika Serikat lebih ofensif dalam mencengkram negara-negara sekitarnya, termasuk di Timur Tengah. Mengingat kondisi Timur Tengah dalam kondisi *Chaos* dengan segala peperangan dan pertumpahan darah, maka Amerika dengan mudah menjadi kawan ataupun lawan dengan kelompok yang berkonflik. Tujuannya apa?, yakni untuk memainkan praktik-praktik ekonomisasi dalam berbagai sektor. Di Timur Tengah, hampir seluruh negara melakukan hubungan bilateral dengan Amerika, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, apalagi Israel sendiri.

Perang di Timur Tengah masih terjadi hingga saat ini, misalkan Perang Suriah, Konflik bersenjata di Yaman, Libya yang hampir mati, Mesir yang belum menemukan arah demokrasi yang pas, referendum etnis Kurdistan, panasnya persaingan Iran dan Arab Saudi, dan kasus klasik Palestina-Israel. Kata Wartawan dan penulis Kompas, Trias Kuncahyono; *“Kawasan Timur Tengah adalah kawasan paling berbahaya di dunia saat ini. Sedikit saja muncul gejolak, maka imbasnya bisa terasa di seluruh dunia”*. Selain konflik berkepanjangan, negara-negara di Timur Tengah yang notabene sebagai negara Arab yang memeluk agama Islam tidak bersatu untuk menyelesaikan prahara-prahara konflik. Mereka bahkan perang antar-saudara, belum lagi ada kelompok ekstrimis seperti ISIS dan kelompok fundamental lainnya, maka kondisi semacam ini di Timur Tengah yang coba dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Jadi kebijakan-kebijakan sekontroversial apapun bisa diimplementasikan oleh otoritas Amerika Serikat manakala kondisi di Timur Tengah seperti itu, termasuk dengan kebijakan memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Bagan 1.2 Aplikasi Teori Pengambil Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin



D. Hipotesa

Berdasarkan teori pembuatan kebijakan luar negeri William D. Coplin, maka dapat diambil hipotesa bahwa kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dengan Memindahkan Kedubes Amerika Serikat ke Yerusalem dan Mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Kondisi Politik dalam negeri Amerika Serikat: *Dibentuknya Jerusalem Embassy Act 1995*, Realisasi janji kampanye Donald Trump, dan

Kuatnya pengaruh kelompok pro-Israel yang memengaruhi kelompok pembuat keputusan luar negeri Amerika Serikat.

2. Kondisi Ekonomi dan Militer: Amerika Serikat sebagai negara Super Power menyebabkan Israel menjalin hubungan bilateral, Israel mendapat manfaat secara finansial dan Amerika Serikat bisa mengamankan Status Quo di Timur Tengah. Dan Amerika tidak bergantung ke negara-negara penghasil minyak Timur Tengah karena kebijakan *Independent Oil* yang membuatnya sebagai negara pertama produsen minyak mentah terbanyak di dunia.
3. Konteks Internasional yaitu ketika negara-negara maju lainnya terus berusaha mengguguli Amerika Serikat dengan pengaruhnya di berbagai sektor, kini Politik Luar Negeri Amerika lebih keras dan ofensif yang diwakilkan dengan semboyan "*Make America Great Again.*" Apalagi kondisi Timur Tengah yang selalu berkonflik, negara-negara Arab tidak bersatu menyebabkan Amerika Serikat dengan mudah memainkan kepentingan-kepentingannya, membuat kebijakan apapun, termasuk kebijakan memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis dengan judul "**Faktor-Faktor yang Memengaruhi Donald Trump dalam Membuat Kebijakan Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel dan Pindahan Kedubes AS Tahun 2017**" memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengetahui penyebab pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem 2017
2. Mengetahui kepentingan kelompok-kelompok pro-Israel dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah.

F. Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian dan pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaan merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan menggunakan analisis terhadap buku-buku, jurnal-jurnal, laporan-laporan, catatan-catatan, laporan-laporan, dan literatur-literatur.

2. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, penulis akan menggunakan dua sumber data, baik primer maupun sekunder. Untuk mendapatkan sumber data primer yang valid dan *up to date* maka penulis akan menggali informasi terkait penelitian melalui wawancara. Kemudian, untuk mengumpulkan data sekunder penulis juga akan menelusuri berbagai macam sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, serta berita baik cetak maupun elektronik untuk memperkuat riset ilmiah yang dilakukan penulis.

3. Teknik Analisis Data

Sejalan dengan tujuan penelitian yang penulis uraikan, maka penulis akan menggunakan model analisis eksplanatif. Melalui model analisis tersebut, maka penulis dapat menggambarkan serta menjelaskan mengenai hal-hal yang mendasari dan mempengaruhi Amerika Serikat dalam proses kebijakan luar negeri terkait Yerusalem.

4. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini bertujuan untuk memberi batasan permasalahan serta kajian bagi penelitian yang diangkat oleh penulis. Jangkauan penelitian yang digunakan penulis terkait dengan dorongan pemerintah Amerika Serikat atas kebijakan luar negeri atas Yerusalem antara tahun 2016-2017. Adapun batasan materi pada penelitian ini ialah pada hal-hal yang mendasari dan memengaruhi adanya upaya diplomatik kelompok kepentingan yang dilancarkan pemerintah Israel, untuk kepentingan nasionalnya.

G. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan, penelitian skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang di dalamnya terdiri dari teknik pengumpulan data, jenis data, teknik analisis data, dan ruang lingkup penelitian. Kemudian yang terakhir adalah Sistematika Penulisan yang tersusun dari bab I,II,II, IV, dan V.

BAB II DESKRIPSI UMUM TENTANG SEJARAH YERUSALEM DAN STATUSNYA DI ATAS KEPENTINGAN PALESTINA DAN ISRAEL

Pada bab ini akan menggambarkan sejarah Kota Yerusalem, Status Yerusalem Secara Hukum Internasional, Israel dan Palestina Sama-sama Merebut Yerusalem, dan Mengapa Yerusalem Diperebutkan.

BAB III DINAMIKA KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT ATAS YERUSALEM DAN STATUS AMERIKA SEBAGAI JURU DAMAI KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

Pada bab ini menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan Amerika Serikat atas Yerusalem, Kebijakan-kebijakan atas perdamaian Israel dan Palestina, dan mengapa kemudian Amerika Serikat Membuat Kebijakan bahwa Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan Memindahkan Kedubesnya dari Tel-Aviv ke Yerusalem.

BAB IV DI BALIK AMERIKA SERIKAT MENGKLAIM YERUSALEM SEBAGAI IBU KOTA ISRAEL

Pada bab ini menjabarkan tentang pengaruh kelompok-kelompok dan individu yang pro Israel dan pengaruh kuat *Jewish Lobby* terhadap kebijakan luar negeri AS. Menjelaskan *track record* dan Sejarah Kelompok Pro Israel di Amerika Serikat. Dan menjabarkan secara detail tentang beberapa faktor domestik, ekonomi militer, dan konteks internasional dalam kebijakan AS tentang Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan Memindahkan Kedubesnya dari Tel-Aviv ke Yerusalem.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian secara keseluruhan, serta daftar pustaka.